

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Senin, 07 Oktober 2019



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Tempo halaman peristiwa 3	Senin, 07 oktober 2019	Gorontalo Diusulkan Miliki KEK Pariwisata	Menteri Pariwisata Arief Yahya mengusulkan adanya penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk mengembangkan wilayah pariwisata Provinsi Gorontalo.
2	Republika Halaman 14	Senin, 07 oktober 2019	Pemerintah Tambah Anggaran FLPP	Pemerintah memastikan akan menambahkan anggaran penyaluran kredit perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
3	Media Indonesia 15	Senin, 07 oktober 2019	Tantangan Bagi Kota Cerdas	Integrasi teknologi dengan tata kelola pemerintah harus menjadikan proses lebih efisien dan efektif.
4	Republika Halaman 22	Senin, 07 oktober 2019	Kota Sukabumi Diusulkan jadi kawasan Wisata Heritage	Kota Sukabumi memiliki banyak peninggalan zaman dahulu dan kini diusulkan menjadi kawasan wisata heritage di Jawa Barat.
5	Bisnis Indonesia Halaman 23	Senin, 07 oktober 2019	Kapan Air Bukan Lagi Barang Mahal	Musim kering membuat Jakarta seolah terpanggang matahari. Cuaca menjadi amat terik. Deretan botol minuman dalam lemari pendingin menjadi sumber pelepas dahaga yang menggiurkan
6	Bisnis Indonesia halaman 23 (2)	Senin, 07 oktober 2019	BUJT Pertanyakan Dana Talangan	Beberapa Badan Usaha jalan tol (BUJT) masih mempersalahkan sebagian dan talangan yang belum juga dikembalikan oleh pihak terkait.
7	Republika Halaman 27	Sabtu, 05 oktober 2019	Tol Pandaan-Malang Seksi 4 Segera Beroperasi	Uji laik Dilakukan Memastikan Keamanan jalan terpenuhi.
8	Kompas Halaman 13	Sabtu, 05 oktober 2019	Tambah FLPP Ditalangi Bank	Anggaran untuk subsidi pembayaran perumahan berskema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP akan ditambah Rp 2 triliun pada tahun ini.

Judul	Gorontalo Diusulkan Miliki KEK Pariwisata	Tanggal	Senin, 07 oktober 2019
Media	Tempo halaman peristiwa 3		
Resume	Menteri Pariwisata Arief Yahya mengusulkan adanya penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk mengembangkan wilayah pariwisata Provinsi Gorontalo.		

PERISTIWA

Gorontalo Diusulkan Miliki KEK Pariwisata

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengusulkan adanya penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk mengembangkan wilayah pariwisata Provinsi Gorontalo.

EDISI, 7 OKTOBER 2019



Dari kiri. Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas

JAKARTA - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengusulkan adanya penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk mengembangkan wilayah pariwisata Provinsi Gorontalo. Menurut dia, KEK merupakan salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan kawasan pariwisata lantaran mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, termasuk dalam hal promosi. "Perizinan pembangunan KEK akan lebih mudah dilakukan sehingga tata bangunan dan langkah-langkah pengelolaannya dapat lebih mudah diterapkan," kata Arief, kemarin.

Dengan penetapan kawasan khusus ini, pemerintah daerah dapat mengundang investor untuk ikut menggarap KEK. "Para investor juga dapat membangun penginapan, restoran, dan berbagai fasilitas pendukung pariwisata lainnya," kata Arief.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Judul	Pemerintah Tambah Anggaran FLPP	Tanggal	Senin, 07 oktober 2019
Media	Republika Halaman 14		
Resume	Pemerintah memastikan akan menamahkan anggaran penyaluran kredit perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).		

Pemerintah Tambah Anggaran FLPP

JAKARTA — Pemerintah memastikan akan menambah anggaran penyaluran kredit perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Tambahan anggaran

FLPP sudah mendapatkan restu Presiden Joko Widodo.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, penambahan anggaran tersebut ditetapkan melalui peraturan menteri keuangan (PMK). "Dokumennya sudah di Setneg. Mudah-mudah sudah turun, harusnya sudah," ujar Basuki ketika ditemui *Republika* di kantornya, Jakarta, Jumat (4/10).

Pemerintah telah mengumpulkan beberapa lembaga ter-

kait, seperti Real Estate Indonesia, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman (Apersi), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera) untuk mempercepat realisasi anggaran ini. Adapun anggaran FLPP mencapai Rp 2 triliun yang bisa dimanfaatkan hingga akhir tahun ini untuk 20 ribu-30 ribu rumah.

"Kita kumpulkan mereka dan sepakat bertemu menteri keuangan dan BTN," kata Basuki.

■ novita intan eda fuji pratiwi

Judul	Tantangan Bagi Kota Cerdas	Tanggal	Senin, 07 oktober 2019
Media	Media Indonesia 15		
Resume	Integrasi teknologi dengan tata kelola pemerintah harus menjadikan proses lebih efisien dan efektif.		

Tantangan bagi Kota Cerdas

Integrasi teknologi dengan tata kelola pemerintah harus menjadikan proses lebih efisien dan efektif.

TESA OKTIANA SURBAKTI
tesa@mediaindonesia.com

KONSEP kota cerdas atau *smart city* semakin familier di Tanah Air. Sayangnya, belum banyak kota yang mengadopsi indikator kota cerdas secara utuh. Kota dikategorikan cerdas ketika mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola dan operasional.

Integrasi bertujuan meningkatkan efisiensi, memudahkan penyediaan informasi publik, perbaikan pelayanan masyarakat, hingga mendorong kesejahteraan masyarakat. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) memandang banyak pemerin-

tah daerah yang mengaitkan konsep kota cerdas dengan teknologi tinggi.

Hampir 50% anggota Apeksi menerapkan kota cerdas walaupun hanya beberapa aspek. Sebagian fokus mengembangkan pelayanan berbasis elektronik (*e-government*).

"Misalnya, mereka punya *e-government*, tetapi tidak mengakomodasi semua pelayanan publik. Di lain sisi, ada kota yang sangat inovatif seperti Semarang. Mereka bekerja sama dengan Go-Jek untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)," kata Direktur Eksekutif Apeksi, Sri Indah Wibi Nastiti, dalam diskusi di Jakarta, pekan lalu.

Pihaknya menyoroti beberapa tantangan yang menghambat

pengembangan kota cerdas di Indonesia, di antaranya perbedaan paradigma, aspek kepemimpinan, kapasitas sumber daya manusia (SDM), inovasi yang minim, keamanan, regulasi kurang mendukung, pemanfaatan teknologi, infrastruktur, dan ketersediaan anggaran.

Menurutnya, pemerintah setempat belum sepenuhnya paham terhadap konsep kota cerdas. Mereka juga belum memiliki perencanaan strategis atau semacam peta jalan (*road map*). Akibatnya, terminologi kota cerdas yang dilakukan masih abu-abu.

"Sebenarnya teknologi bukan kunci utama pengembangan *smart city*. Banyak cara yang bisa mendukung penerapan *smart city*, termasuk kapasitas pemimpin daerah. Apakah mereka memiliki visi untuk memajukan kota dan perencanaan yang tepat agar *smart city* terwujud?" pungkas Sri.

Aplikasi

EVP Media and Digital Department PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), Joddy Hernadi, menambahkan dukungan perusahaan terhadap pengembangan kota cerdas di Tanah Air.

Salah satu bentuk dukungan itu dengan menyiapkan platform Smart City Nusantara (SCN). Sebelumnya, perusahaan penyedia layanan jasa dan jaringan telekomunikasi tersebut telah membangun Living Lab Smart City Nusantara.

Terdapat berbagai program aplikasi yang dapat diterapkan dalam sistem pemerintah, seperti *smart government* yang mencakup *command center*, *e-kelurahan*, dan SIAP online. Ada pula *smart industry* yang meliputi *smart citizen* dan pemungutan pajak berbasis daring.

"Kami coba mengembangkan banyak hal untuk men-

dukung implementasi *smart city*. Belum lama ini kami meluncurkan platform yang memudahkan," ucap Joddy.

Bagaimanapun, lanjutnya, teknologi digital berperan penting dalam pengembangan kota cerdas di berbagai wilayah. Integrasi teknologi dengan tata kelola pemerintah harus menjadikan proses lebih efisien dan efektif.

Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Marina Berg, menekankan pembangunan kota cerdas berperan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu aspek penting untuk mengimplementasikan *smart city* ialah menurunkan ketergantungan konsumsi energi, khususnya energi fosil.

Apalagi, kehidupan perkotaan tidak lepas dari aspek kelistrikan. Karenanya, pemerintah perlu berupaya memanfaatkan energi terbarukan. (S-3)

Judul	Kota Sukabumi Diusulkan jadi kawasan Wisata Heritage	Tanggal	Senin, 07 oktober 2019
Media	Republika Halaman 22		
Resume	Kota Sukabumi memiliki banyak peninggalan zaman dahulu dan kini di usulkan menjadi kawasan wisata heritage di Jawa Barat.		

Kota Sukabumi Diusulkan Jadi Kawasan Wisata *Heritage*

● RIGA NURUL IMAN

SUKABUMI -- Kota Sukabumi memiliki banyak peninggalan zaman dahulu dan kini diusulkan menjadi kawasan wisata *heritage* di Jawa Barat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan yang akan mendorong perekonomian warga. Hal ini disampaikan Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dalam pembukaan pameran dan Festival Soekaboemi Tempo Doeloe 2019 yang digelar di Wisma Wisnu Wardani Kota Sukabumi di Kompleks Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri Sukabumi, Sabtu (5/10). "Di Indonesia, hanya ada lima kota/kabupaten yang memiliki ciri peninggalan sejarah yang sama pada masa Belanda," ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi.

Kelima daerah itu menurutnya, DKI Jakarta, Surabaya, Malang, Bandung serta Kota Sukabumi. Di mana peninggalan bangunan hampir mirip dan jadi kebanggaan tersendiri.

Di Sukabumi terdapat banyak bangunan *heritage* seperti stasiun kereta api, pegadaian, bangunan di Kompleks Setukpa Polri dan rumah pengasingan Bung Hatta-Syahrir. Sehingga sangat mendukung Sukabumi ditetapkan sebagai kawasan wisata *heritage* di Jawa Barat.

Gubernur Jabar, menurut Fahmi, meminta waktu selama tiga bulan untuk menyatakan Sukabumi layak atau tidak sebagai daerah wisata *heritage*. Namun berdasarkan fakta di lapangan, Sukabumi optimis dapat menjadi kawasan wisata *heritage* di Jabar. Di sisi lain, banyaknya peninggalan zaman Belanda menjadi

pendorong bagi pemda dalam kerangka menjaga bangunan atau peninggalan dalam bentuk apapun. Sebabnya hal tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah agar teridentifikasi dan ada dasar hukum perlindungannya.

Pemkot ungkap Fahmi, tengah membahas naskah akademik peraturan daerah (perda) cagar budaya dengan melibatkan berbagai elemen. Targetnya tahun depan perda untuk melindungi berbagai peninggalan sejarah bisa disahkan. "Berharap Soekaboemi Tempo Doeloe bukan menjadi melankolis atau berandai-andai pada waktu dulu, harapannya ke depan napak tilas dari berbagai perencanaan yang dilakukan pendahulu," imbuh Fahmi. Sehingga pemkot mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Dapur Kipahare yang menggagas acara dan Setukpa Polri yang menyediakan lokasi acara.

Acara ini juga lanjut Fahmi menjadi pendorong untuk terus mengingat sejarah yang terjadi di Kota Sukabumi. Sebabnya, perkembangan saat ini tidak bisa lepas dari sejarah dan sudah ditegaskan para pendahulu jangan pernah melupakan sejarah. Bukan hanya sejarah politik dan pemerintahan, akan tetapi pembangunan yang dilakukan pada masa lalu termasuk peninggalan sejarah. Oleh karena itu sudah selayaknya bangunan bersejarah di Sukabumi harus dijaga.

Kepala Setukpa Lemdikpol Polri Brigjen Agus Suryatno menambahkan, bangunan di Setukpa Polri sebagian memang masuk dalam bangunan bersejarah. Terutama dalam sejarah bidang pendidikan di kepolisian di tanah air.

■ ed: rachmat santosa basarah

Judul	Kapan Air Bukan Lagi Barang Mahal	Tanggal	Senin, 07 oktober 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 23		
Resume	Musim kering membuat Jakarta seolah terpanggang matahari. Cuaca menjadi amat terik. Deretan botol minuman dalam lemari pendingin menjadi sumber pelepas dahaga yang menggiurkan		

► AKSES AIR BERSIH

Kapan Air Bukan Lagi Barang Mahal?

Musim kering membuat Jakarta seolah terpanggang matahari. Cuaca menjadi amat terik. Deretan botol minuman dalam lemari pendingin menjadi sumber pelepas dahaga yang menggiurkan.

Rivki Maulana
rivki.maulana@bisnis.com

Penulis menandakan satu botol air mineral di warung milik Warni (54) saat bertandang ke Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pekan lalu.

Warung Warni berjarak sepelemparan batu dari tanggul laut penangkal rob. Dia berkisah, tanggul memang telah menghalau rob dari permukiman. Namun, air bersih sukar dijangkau (*Bisnis* 4/10, Air Laut Terhalau, Air Tawar Tak Terjangkau). Tidak ada air leding dari perusahaan air minum yang mengalir ke Muara Baru. "Beli air ya di jeriken yang lewat bawa gerobak," tutuhnya.

Untuk kebutuhan mandi dan cuci, saban hari warga Muara Baru perlu merogoh kocek rata-rata Rp30.000. Angka itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga rata-rata satu kubik meter air yang dijual PDAM sebesar Rp4.819.

Air menjadi barang mahal bagi warga di wilayah itu. Potret kelangkaan air bersih di Muara Baru cukup ironis. Muara Baru hanya berjarak 7 km dari Istana Negara dan Balai Kota DKI Jakarta.

Boleh dibayangkan, pembangunan infrastruktur di sektor air minum kurang mencolok. Sektor air minum seakan jauh dari gegap

► Untuk mencapai akses air minum 100%, sedikitnya diperlukan Rp253,8 triliun dengan komposisi 26% dari anggaran negara, 47% dari anggaran daerah, dan 27% dari badan usaha.

gempita sebagaimana terjadi di sektor jalan tol. Padahal, air adalah sumber daya yang tak bisa digantikan oleh apapun dan menjadi kebutuhan dasar manusia.

Dalam rencana strategis 2015-2019, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) menancangkan program 100-0-100. Artinya, 100% akses air minum, 0% permukiman kumuh, 100% akses sanitas. Sayangnya, target akses air minum itu tidak tercapai, dan diyakini hanya mencapai level 78% tahun ini.

Dalam visium Kementerian PUPR, pemenuhan akses air minum 100% baru terpenuhi pada 2030 atau rata-rata ada progres 2,2% setiap tahun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam lima tahun ke depan pihaknya bakal memprioritaskan pembangunan di sektor air minum. Hingga 2024, pemerintah menargetkan penambahan sambungan baru sebanyak 10 juta. Di samping menambah sambungan baru, rehabilitasi jaringan perpipaan juga perlu dilakukan agar kualitas air yang diproduksi layak untuk langsung dikonsumsi.

Sesungguhnya, pemenuhan akses akan air minum menjadi tanggung jawab banyak pihak. Pemerintah daerah punya tanggung jawab besar untuk menyelenggarakan sistem penyediaan air minum. Pemerintah pusat dan badan usaha juga bisa memberikan dukungan untuk mempercepat program penyediaan air minum di daerah.

Untuk mencapai akses air minum 100%, sedikitnya diperlukan Rp253,8 triliun dengan komposisi 26% dari anggaran negara, 47% dari anggaran daerah, dan 27%



dari badan usaha. Terlepas dari kebutuhan investasi besar, salah satu pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan adalah kinerja perusahaan daerah air minum (PDAM).

40% SAKIT

Badan Peningkatan Penyelenggaraan SPAM (BPPSPAM) mencatat, dari 380 PDAM di Indonesia, hanya 60% yang memiliki kinerja sehat sedangkan 40% lainnya berkemungkinan kurang sehat dan sakit. Problem lain, tingkat kebocoran atau *non-revenue water* masih tinggi, yakni 33,2%. Secara keseluruhan ada 11,42 juta sambungan pelanggan hingga 2018.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga pernah mengatakan upaya menyehatkan kinerja PDAM perlu terus dilakukan lewat peningkatan kapasitas permodalan PDAM. Pemerintah pusat, lanjutnya memberikan pendampingan, baik dalam peningkatan kapasitas maupun pendampingan kerja sama perusahaan lewat BPPSPAM.

I. Jaminan Pemerintah Pusat sebanyak 70% dari jumlah kewajiban pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM yang telah jatuh tempo, dan sisanya sebanyak 30% dari pokok kredit menjadi risiko bank yang memberikan kredit investasi.

(1) Jaminan Pemerintah Pusat diberikan kepada PDAM yang:

- menunjukkan kinerja sehat yang dibuktikan oleh hasil evaluasi kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama dua tahun berturut-turut; dan
- telah menetapkan tarif rata-rata yang lebih besar dari seluruh biaya rata-rata per unit (*full cost recovery*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama dua tahun berturut-turut sebelum masa penjaminan dan sampai berakhir masa penjaminan.

(2) Terhadap PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dalam tahap restrukturisasi, juga wajib memenuhi persyaratan program restrukturisasi dan mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(3) Terhadap PDAM yang menunjukkan kinerja kurang sehat atau sakit, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi peningkatan kinerja sampai memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pemerintahan daerah, dan keuangan negara.

(5) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum.

II. Pemerintah Pusat menyediakan anggaran subsidi bunga selama jangka waktu kredit investasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(1) Tingkat bunga kredit investasi yang disalurkan bank kepada PDAM, ditetapkan sebesar imbal hasil rata-rata tertimbang hasil lelang Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 12 Bulan sebagai acuan suku bunga ditambah paling tinggi 5%, dengan ketentuan:

- tingkat bunga sebesar imbal hasil rata-rata tertimbang hasil lelang SPN 12 Bulan ditanggung PDAM; dan
- selisih bunga di atas imbal hasil rata-rata tertimbang hasil lelang SPN 12 Bulan paling tinggi sebesar 5% menjadi subsidi yang ditanggung Pemerintah Pusat.

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 46/2019 Tentang Pemberian Jaminan oleh Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

BANGKALAN: PRADAT

"Komitmen pemda masih rendah. Secara rata-rata, alokasi APBD [anggaran pendapatan dan belanja daerah] untuk PDAM hanya 0,36%. Investasi untuk air bersih juga kurang dari 10%," terangnya.

Untuk mendukung kinerja PDAM, Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan Perpres No.16 Tahun 2019 dan diteken Presiden Joko Widodo pada 4 Juli 2019. Beleid ini diterbitkan untuk menjadi landasan hukum pemberian jaminan dan subsidi bunga bagi PDAM.

Hanya PDAM yang memenuhi persyaratan mendapat fasilitas itu, antara lain berkemungkinan sehat dan tarif rata-rata lebih besar dari biaya rata-rata per unit (*full cost recovery*). Saat ini, terdapat 105 PDAM yang memenuhi syarat untuk mendapatkan jaminan dan subsidi bunga dari pemerintah pusat itu.

Untuk menggenjot akses air minum, dalam 5 tahun ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan 10 juta sambungan baru dengan investasi Rp92,3 triliun.

Kementerian PUPR bakal membangun SPAM baru dengan kapasitas 45.200 liter per detik (lpd). Di samping itu, kapasitas juga digenjot lewat optimalisasi SPAM yang sudah ada sebesar 21.350 lpd dan penurunan kebocoran 18.400 lpd.

Hingga September 2019, BPPSPAM melansir ada 7 proyek KPBU yang bergulir dengan enam proyek di antaranya sudah memulai konstruksi, yakni SPAM Jatisari Kota Bekasi, SPAM Umbulan, SPAM Bandar Lampung, SPAM Semarang Barat, SPAM Dumai, dan SPAM Kali Angke Tangsel.

Juga terdapat 10 proyek SPAM yang sedang dalam persiapan untuk dibangun lewat skema KPBU, di antaranya SPAM Sarbagikung, SPAM Karian-Serpong, SPAM Ciawi, SPAM Kamijoro, dan SPAM Kota Tangerang.

Jadi, untuk menjamin akses air bagi masyarakat, seluruh pemangku kepentingan perlu bergotong royong. Akankah kehidupan bisa terus berlanjut tanpa ketersediaan air yang cukup? ■

Judul	BUJT Pertanyakan Dana Talangan	Tanggal	Senin, 07 oktober 2019
Media	Bisnis Indonesia halaman 23 (2)		
Resume	Beberapa Badan Usaha jalan tol (BUJT) masih mempersalahkan sebagian dan talangan yang belum juga dikembalikan oleh pihak terkait.		

► LAHAN JALAN TOL

BUJT Pertanyakan Dana Talangan

Bisnis, JAKARTA — Beberapa badan usaha jalan tol (BUJT) masih memperlmasalahkan sebagian dana talangan yang belum juga dikembalikan oleh pihak terkait.

Direktur Utama Waskita Toll Road Herwidiakto mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima dana talangan.

“Dana talangan pra PSN [proyek strategis negara] itu masih belum bisa dicairkan, jadi kan janjinya Pak Menteri PUPR mau memindah ke dana DIPA [daftar isian proyek anggaran], kayaknya Menteri Keuangan nolak,” ujarnya kepada *Bisnis*, pekan lalu.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.

Herwidiakto menambahkan bahwa jawaban surat dari Menteri Keuangan seperti menolak halus pembayaran proyek pra PSN ruas tol Pasuruan—Probolinggo (Paspro) dan Krian—Legundi—Bunder—Manyar (KLBM),

padahal seharusnya bisa dibayarkan.

“Jawabannya Menteri Keuangan istilahnya menolak halus, seperti agar mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Kan tidak jelas jawabannya.”

Menurut Herwidiakto, apabila diterjemahkan jawaban dari Menkeu adalah proyek pra PSN di luar tahun anggaran, dan sekarang dana APBN tidak bisa dipakai untuk anggaran yang sudah keluar beberapa tahun lalu.

Saat awal pembebasan tanah sebelum proyek tersebut masuk PSN, WTR sudah menggelontorkan Rp550 miliar untuk pembebasan lahan tol dan Krian—Legundi—Bunder—Manyar (KLBM) di luar ruas Bunder—Manyar.

Sementara itu, perkiraan kebutuhan tanah untuk ruas tol Pasuruan—Probolinggo (Paspro) mencapai Rp1,2 triliun, dan sudah ditanggung juga setengahnya sebelum proyek tersebut masuk PSN.

Pada awal daftar diterbitkan sesuai dengan Peraturan Presiden No.3/2016 tentang PSN, kedua ruas tol tersebut belum masuk sebagai PSN dan baru direvisi statusnya menjadi masuk PSN dalam Perpres No.57/2017.

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani juga mengatakan belum menerima dana talangan kendati sudah ada revisi aturan terkait fleksibilitas dana talangan, khususnya penggunaan dana lintas tahun anggaran oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

“Belum, kita juga nggak tahu kapan kita juga ngejar-ngejar, padahal terus diomongkan tapi kok masih belum juga,” katanya.

Desi menambahkan, total dana talangan yang belum dikembalikan sebesar Rp5 triliun dari banyak proyek tol yang dikerjakan Jasa Marga.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan bahwa dana DIPA Kementerian PUPR dapat digunakan untuk membayar tanah yang tidak bisa ditalangi LMAN.

“Sebelum ini kan kita evaluasi ada sisa lelang Rp3 triliun, kita pelajari lagi ada potensi kalau dilelang sisanya ada sekitar Rp5 triliun lebih. Nah, saya minta kalau bisa itu saya mau bayar untuk tanah dulu,” tuturnya.

(Krizia Putri Kinanti)

Judul	Tol Pandaan-Malang Seksi 4 Segera Beroperasi	Tanggal	Senin, 07 oktober 2019
Media	Republika 5 Halaman 27		
Resume	Uji laik Dilakukan Memastikan Keamanan jalan terpenuhi.		

Tol Pandaan-Malang Seksi 4 Segera Beroperasi

● WILDA FIZRIYANI, DADANG KURNIA

Uji laik dilakukan untuk memastikan keamanan jalan terpenuhi.

PASURUAN — Pembangunan fisik atau konstruksi jalan tol Pandaan-Malang seksi 4 (Pakis 1-Pakis 2) sepanjang 4,75 kilometer telah rampung 100 persen sejak akhir September 2019. PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM), selaku pengelola menargetkan tol Pandaan-Malang seksi 4 dapat beroperasi bulan ini.

"Seksi 1 sampai dengan 3 sudah diberlakukan tarif sejak 9 Agustus 2019. Saat ini untuk seksi 4 sudah selesai konstruksi 100 persen," ujar Direktur Utama PT JPM, Agus Purmono, dikonfirmasi Jumat (4/10).

Ia mengungkapkan, jalan tol Pandaan-Malang seksi 4 juga telah selesai melewati tahap uji laik oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan

Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Agus menambahkan, uji laik dilakukan untuk memastikan keamanan jalan terpenuhi.

"Uji laik mencakup guard rail atau pagar pengaman jalan, marka, rambu, penerangan jalan umum (PJU), hingga konstruksi secara keseluruhan," ujar Agus.

Agus melanjutkan, berdasarkan hasil pengujian, jalan tol Pandaan-Malang seksi 4 telah dinyatakan lulus uji laik. Dia pun berharap, dalam waktu dekat, Surat Keputusan (SK) operasi dan tarifnya segera keluar agar dapat segera digunakan oleh masyarakat.

Sebelumnya, ia menyatakan, pembayaran tol hanya menggunakan sistem elektronik atau e-toll, dan mulai berlaku sejak 9 Agustus. "Kita 100 persen pakai e-toll. Kalau masyarakat mau gunakan jalan tol, harus persiapan kartu elektronik. Kalau tidak ada, *enggak* bisa masuk gerbang, portal tidak bisa dibuka".

Di setiap gerbang, pihaknya menyediakan alat pengisian ulang e-toll. Untuk mengisi ulang, pengguna ha-

rus memiliki kartu e-toll terlebih dahulu. Hal ini terutama kartu dari Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BCA.

Agus mengingatkan, pengguna agar menyiapkan e-toll sebaik mungkin sebelum bepergian. Kartu elektronik dipastikan memiliki saldo cukup sehingga tidak menyebabkan antrian di gerbang tol. Sebab, proses itu bisa memakan waktu lebih lama.

"Masyarakat harus sadar dan empati, kalau *enggak* dipersiapkan akan mengganggu pengguna lain," tambah dia.

Sementara itu, Komisaris Utama Jasa Marga, Sapto Amal Damandari, memberikan target kepada PT JPM untuk melakukan percepatan pembangunan konstruksi jalan tol Pandaan-Malang seksi 5 (Pakis-Malang). Jalan tol yang memiliki panjang 3,11 kilometer, progresnya telah mencapai 76 persen pada akhir September 2019.

Sapto berharap, untuk seksi 5 (Pakis-Malang) diharapkan dapat beroperasi secara fungsional untuk mendukung arus mudik dan balik pada libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. "Mudah-mudahan, jalan tol ini dapat bermanfaat bagi masyarakat

Indonesia, khususnya masyarakat di Jawa Timur yang selama ini membutuhkan mobilisasi orang maupun jasa yang lebih cepat antara Kota Surabaya dan Malang," kata Sapto.

Jalan tol Pandaan-Malang memiliki total 38,488 km. Pembangunannya dibagi dalam lima seksi. Tiga seksi sudah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 13 Mei 2019. Ketiga seksi itu adalah seksi 1 (Pandaan-Purwodadi) sepanjang 15,475 km, seksi 2 (Purwodadi-Lawang) 8,05 km, dan seksi 3 (Lawang-Singosari) 7,10 km.

Sementara itu, seksi 4 (Pakis 1-Pakis 2) sepanjang 4,75 km dan seksi 5 (Pakis-Malang) sepanjang 3,11 km masih dalam tahap penyelesaian. Walaupun bukan termasuk bagian tol Trans Jawa, jalan tol Pandaan-Malang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Jalan tol ini dapat memangkas waktu tempuh antara Surabaya dan Malang yang sebelumnya 4-5 jam menjadi 1,5 jam. Selain itu, jalan tol Pandaan-Malang dapat menjadi pilihan utama bagi warga Surabaya yang ingin berlibur ke daerah Malang Raya. ■ ed : yusuf assidiq

Judul	Tambah FLPP Ditalangi Bank	Tanggal	Sabtu, 05 oktober 2019
Media	Kompas 5 Halaman 13		
Resume	Anggaran untuk subsidi pembiayaan perumahan beskema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atas FLPP akan ditambah Rp 2 triliun pada tahun ini.		

Tambahan FLPP Ditalangi Bank

JAKARTA, KOMPAS – Anggaran untuk subsidi pembiayaan perumahan berskema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP akan ditambah Rp 2 triliun pada tahun ini. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah akan meminta bank-bank pelaksana FLPP menyediakan dan menyalurkan dananya lebih dulu.

Selanjutnya, pemerintah akan mengganti dana tersebut pada 2020, disertai tambahan biaya dana.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyampaikan, salah satu bank yang diminta menalangi tambahan dana FLPP lebih dulu adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nantinya, dana talangan akan diganti menggunakan dana APBN 2020.

Kepastian tambahan dana FLPP sebesar Rp 2 triliun itu diputuskan dalam pertemuan Basuki dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, asosiasi pengembang perumahan, dan bank penyalur FLPP. "Jumlah itu hanya untuk yang berskema FLPP. Kira-kira bisa untuk 30.000 unit rumah," kata Basuki di Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Sebelumnya, beberapa perwakilan dari asosiasi pengembang telah bertemu Presiden Joko Widodo dan meminta agar dana FLPP ditambah. Sebab, alokasi anggaran FLPP tahun ini yang sebanyak 68.000 unit sudah habis diserap masyarakat.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, skema pencairan dana tambahan FLPP tidak melalui perubahan APBN. Saat ini, dana tambahan FLPP yang tersedia dan siap dicairkan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) maksimal Rp 500 miliar. Adapun kekurangan dana tambahan FLPP sekitar Rp 1,5 triliun belum disepakati skema pencairannya.

"FLPP adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk pembiayaan investasi. Untuk itu, tambahan pembiayaan investasi tidak bisa seenaknya, harus ada APBN Perubahan. Saat ini, APBN Perubahan tidak memungkinkan karena membutuhkan waktu dan proses panjang," kata Isa dalam bincang bersama media di Jakarta, Jumat (4/10/).

Direktur Utama Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo mengatakan, porsi SMF untuk program FLPP meningkat dari 10 persen menjadi 25 persen. Alokasi anggaran untuk FLPP diperoleh dari penyertaan modal negara dan penerbitan surat utang berdenominasi rupiah. (NAD/KRN)